

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Pelaksanaan *e-planning* dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Agam mulai dibangun dan dikembangkan pada tahun 2017. Salah satu tujuan pengadopsian *e-government* adalah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. *e-Planning* hadir dengan tujuan dapat memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan perumusan dan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara elektronik. Untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang secara optimal, pelaksanaan *e-planning* tidak hanya hadir dalam memberikan kemudahan bagi *stakeholder* pemerintahan namun pelaksanaan *e-planning* dapat memberikan cakupan luas bagi proses perencanaan pembangunan di mata publik.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Savodelli , Codagnone, dan Misuraca mengenai hubungan antara pendorong utama pengadopsian *e-government*, pelaksanaan *e-planning* dalam proses perencanaan pembangunan daerah mempunyai beberapa hubungan yang saling berkaitan dalam mendorong pelaksanaan *e-planning*. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari keenam unsur ini secara umum sudah terpenuhi dengan baik dalam pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam Tahun 2020. Namun pada beberapa indikator dari unsur tersebut masih terdapat kendala yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah. Beberapa indikator yang kurang optimal

tersebut menyebabkan dampak pada indikator lainnya dalam pelaksanaan *e-planning*,

Indikator utama yang masih terdapat kendala yaitu pada unsur *support* dalam hal pengoptimalan sosialisasi. Sosialisasi pelaksanaan *e-planning* yang hanya berfokus pada pengguna memberikan dampak besar terhadap unsur lainnya dalam kesuksesan pelaksanaan *e-planning*. Kendala pada elemen *support* ini berkaitan dengan indikator sosialisasi yang mana tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Agam kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan pemanfaatan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan. Dengan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, memberikan dampak pada kurang optimalnya nilai kepercayaan masyarakat pada pemerintahan dan kehadiran *e-planning* sendiri dalam tatanan pemerintahan. Disisi lain indikator transparansi yang sudah optimal dengan hadirnya *e-planning* menjadi kurang optimal karena tidak banyak masyarakat yang mengetahui bentuk transparansi yang dapat dihadirkan oleh pelaksanaan *e-planning*.

6.2 Saran

Pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2020 di Kabupaten Agam secara umum sudah baik, namun kedepanya masih perlu pengoptimalan dalam beberapa aspek untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih baik lagi. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Agam terkait pelaksanaan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Agam:

1. Pelaksanaan sosialisai yang tidak hanya berfokus pada pengguna *e-planning*, namun juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat umum. Hal ini sangat penting untuk memberikan pengertian dan pemahaman tentang manfaat pelaksanaan *e-planning* terhadap perencanaan pembangunan daerah bagi masyarakat, agar masyarakat lebih memahami fungsi masyarakat dalam pengawasan proses perencanaan pembangunan.
2. Dengan memberikan sosialisasi yang optimal terhadap masyarakat dapat meningkatkan nilai kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Hal ini sangat berguna dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap manfaat dalam pelaksanaan *e-planning* dan pemerintahan yang menjalankan proses perencanaan pembangunan.
3. Transparansi dalam pelaksanaan *e-planning* harus disosialisasikan lebih optimal lagi kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mengetahui proses perencanaan pembangunan yang sedang berlangsung.
4. Meningkatkan pengembangan layanan *e-planning* yang lebih berbasis publik sehingga memberikan kesempatan bagi publik untuk dapat memberikan saran dan kritikan yang lebih baik lagi terhadap perencanaan pembangunan daerah. Sehingga ketercapaian dari visi misi Kabupaten Agam dalam perencanaan pembangunan dapat lebih optimal lagi dengan mempertimbangkan saran dan kritikan dari publik.

